

PROBLEMATIKA SEKOLAH INKLUSI DI PERBATASAN

Nuraini

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Email: nurainiiaissambas@gmail.com

Abstract

Schools providing inclusive education need to be supported by Special Educator Teachers in the learning process and in developing children with special needs in general. Problems that arise between one another when studied in depth can be interconnected, such as problems with students, teachers, schools, government, or the community. With regard to the problem of teachers, teachers have complaints where there is a lack of competence related to handling ABK (Children with Special Needs) where the cause is the lack of understanding of teachers related to inclusive schools and ABK which further impacts on the problem of difficulties. Problems in these inclusive schools include: learning problems in class, problems with facilities and infrastructure, problems with educators, problems with collaboration between parents, the community and the business world. It needs optimal management of all elements that hold the process of success of inclusive schools, especially at the border.

Keywords: *Problematics, Inclusive Schools, Borders.*

Abstrak

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh Guru Pendidik Khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Masalah yang timbul diantara satu dengan lainnya apabila dikaji mendalam bisa saling berhubungan, seperti masalah siswa, guru, sekolah, pemerintah, ataupun masyarakat. Berkenaan pada masalah guru, guru memiliki keluhan dimana kurangnya kompetensi terkait penanganan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dimana penyebabnya yakni pemahaman guru yang kurang terkait sekolah inklusi serta ABK yang selanjutnya berimbas pada masalah kesulitannya. Problem di sekolah inklusi tersebut antara lain: problem pembelajaran di kelas, problem sarana dan prasarana, problem tenaga pendidik, problem kerjasama baik orangtua, masyarakat dan dunia usaha. Perlu pengelolaan yang optimal dari semua elemen yang memegang proses suksesnya sekolah inklusi khususnya di perbatasan.

Kata Kunci : *Problematika, Sekolah Inklusi, Perbatasan.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 serta undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab IV ayat 1 menjelaskan bahwasanya seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas (UU No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional). PAI yakni pendidikan yang memberi pengetahuan serta mewujudkan keterampilan, kepribadian, serta sikap siswa untuk mengamalkan apa yang agama ajarkan dimana dilaksanakan setidaknya dengan mata pelajaran dalam seluruh jalur, jenis, serta jenjang pendidikan. Melalui orientasi menumbuhkan kehidupannya siswa dalam beragama, kreatifitas, seni, nilai serta berkomunikasi dari beragam dimensi yang sejalan pada diri siswa serta dibutuhkan bangsa, masyarakat, serta umat manusia (Permendikbud, Nomor. 24 Tahun 2016, Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang SMP/MTs).

Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Anak Luar Biasa menjelaskan bahwasanya pendidikan luar biasa khusus untuk bagi siswa dengan kelainan mental maupun fisik, dimana bertujuan membantu siswa tersebut supaya bisa menumbuhkan keterampilan, pengetahuan, serta sikapnya selaku pribadi ataupun bagian dari masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 1991. Tentang Pendidikan Luar Biasa); (Aslan, 2017).

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh Guru Pendidik Khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Antara guru kelas dan GPK saling bekerjasama dalam melayani anak berkebutuhan khusus, mulai dari mengidentifikasi anak, mengasesmen anak, sampai kepada menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak tersebut. Program Pembelajaran Individual (PPI) ini terkadang juga tidak semua anak berkebutuhan khusus membutuhkannya. Disinilah GPK berperan yaitu sebagai tempat berbagi pengalaman bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, karena tidak semua guru di sekolah reguler paham siapa dan bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus serta apa pembelajaran yang dibutuhkan mereka sesuai dengan kekhususan anak tersebut (Agung Tri Wibowo Nur Laila Anisa, tth).

Masalah yang timbul diantara satu dengan lainnya apabila dikaji mendalam bisa saling berhubungan, seperti masalah siswa, guru, sekolah, pemerintah, ataupun masyarakat. Berkenaan pada masalah guru, guru memiliki keluhan dimana kurangnya kompetensi terkait penanganan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dimana penyebabnya yakni pemahaman guru yang kurang terkait sekolah inklusi serta ABK yang selanjutnya berimbas pada masalah kesulitannya aktivitas pembelajaran oleh guru. Kondisi tersebut pun didukung oleh realita dimana terdapat sejumlah guru yang latar pendidikannya tidak tepat serta Guru Pendamping Kelas yang kurang dimana mampu memperberat beban kerjanya guru sendiri. Melalui kondisi tersebut dengan tidak langsung akan berdampak pada kurang maksimalnya kinerja guru dalam menangani peserta didik, kemudian guru pun dihadapkan dengan beragam masalah ABK dimana membutuhkan penanganannya masing-masing serta jumlahnya ABK yang melampaui kapasitas kelas yang menyebabkan Kegiatan Belajar Mengajar menjadi kurang lancar (Jane M. Keothermen, 2007). Melalui tulisan ini berusaha menjelaskan problem yang dialami oleh penyelenggaraan sekolah inklusi khusus diperbatasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan (*library reaserch*) M. Nazir mengungkapkan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap beberapa literature, atau refrensi buku-buku yang berkaitan dengan persoalan yang penulis angkat, dalam hal ini pelaksanaan pembelajaran di sekolah pad masa kebiasaan baru. (M. Nazir, 1998). Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini data kualitatif yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah pada masa kebiasaan baru (*new normal*), dengan demikian manfaat data adalah untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, dan untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan, karena persoalan yang timbul

pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu memecahkan persoalan ditujukan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan tersebut. (Marwanto, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Pembelajaran di Kelas

Tahap perencanaan merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam rangkaian kegiatan managerial, tidak terkecuali dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif. Oleh karena itu, pihak sekolah tidak ingin menganggap mudah pada tahap perencanaan ini. Berbekal dari pengalaman sekolah dalam menangani PDBK jauh sebelum ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka salah satu langkah preventif sekolah dalam memastikan bahwa kurikulum inklusif yang diperuntukkan bagi PDBK ini dapat sesuai dengan kekhususannya maka sekolah memiliki cara tersendiri dalam perencanaan kurikulum sekolah inklusif ini. Cara tersebut adalah dengan membentuk tim khusus sebelum dilakukan secara bersama-sama dalam tim umum.

Seorang guru hendaknya mengetahui program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Pola pembelajarannya harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus, biasa disebut dengan Individualized Educational Program (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI), perbedaan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pendidik harus memiliki kemampuan khusus. Pada kenyataannya hasil monitoring sekolah inklusi yang dilakukan oleh Direktorat PSLB menemukan bahwa sebagian besar guru sekolah inklusi mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non akademik. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Selain itu, guru juga masih terbebani dengan adanya tuntutan administrasi dari sekolah. Tuntutan administrasi sekolah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus antara lain, beban pengumpulan data yang diperlukan untuk prosedur penilaian fungsional, administrasi untuk pendanaan, laporan untuk guru khusus, dan laporan pelayanan yang diberikan (Folin, 1997). Beban yang dirasakan itulah yang menyebabkan ketidaksanggupan guru untuk memasukkan siswa berkebutuhan khusus di kelas mereka (Jamilah Candra Pratiwi, 2015).

Program yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di rumah, Program yang mempertimbangkan kebutuhan individual berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya dan program yang telah berjalan namun disesuaikan kembali dengan kondisi rumah. Selain akademik, fokus juga kepada program yang melatih rutinitas dan keterampilan hidup sehari-hari, walaupun dirumah saja namun anak harus mampu mandiri dengan program pembelajaran individu yang telah diberikan orang tua hanya tinggal meneruskan program tersebut dirumah. Program yang tetap meningkatkan Partisipasi semua peserta didik, seperti kerja kelompok atau proyek seni. Program belajar yang tetap memungkinkan adanya interaksi, antara guru, peserta didik, dan orang tua (Narullyta Puspita Dewi, 2020).

Mengajar siswa yang berkebutuhan khusus sangatlah berbeda karena karakter dan ragam disabilitas yang berbeda-beda. Pembelajaran di rumah ditekankan pada bina diri tata tertib dirumah, kebersihan diri sendiri. Perlu sosialisasi terkait media dan cara pembelajaran yang dilakukan kepada siswa. karena tidak semua siswa memiliki sarana terkait hal tersebut. dan tidak semua siswa tinggal bersama orang tua kandungnya. Memberikan bantuan dan solusi

untuk menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran di rumah, Menambah referensi pembelajaran di rumah baik model pembelajaran, strategi maupun bahan ajar terutama bagi sekolah luar biasa Peningkatan kemampuan teknologi ilmu komunikasi untuk membuat strategi pembelajaran yang menarik baik dengan pelatihan mandiri ataupun yang diadakan dinas pendidikan Menyediakan media pembelajaran untuk peserta didik Mendesain belajar di rumah yang bisa menjangkau ke seluruh peserta didik sesuai karakteristik (Narullyta Puspita Dewi), diantaranya;

1. Anak yang menggunakan bahasa ibu, dan bahasa minoritas yang berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas, dan atau berbeda dengan bahasa yang digunakan di dalam buku-buku pelajaran dan bacaan yang digunakan;
2. Anak yang beresiko putus sekolah karena korban bencana, konflik, bermasalah dalam sosial ekonomi, daerah terpencil, atau tidak berprestasi dengan baik;
3. Anak yang berasal dari golongan agama atau kasta yang berbeda;
4. Anak yang sedang hamil;
5. Anak yang beresiko putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan/penyakit kronis seperti asma, jantung, alergi, terinfeksi HIV dan AIDS;
6. Anak yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah. Semua anak, baik cacat maupun tidak mempunyai hak untuk belajar bersama-sama dengan anak yang lain.
7. Seyogyanya anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar.
8. Tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Anak memiliki kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Ia tidak pernah ada upaya untuk melindungi dirinya dengan yang lain.
9. Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan.
10. Tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu mengambil bagian dalam menangani anak di sekolah pada umumnya. 6. Semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakatnya.
11. Hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk menekan rasa takut dalam membangun kebertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman diri (Tyas Martika Anggriana, 2016).

Problem Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi asesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sarana dan Prasarana pendidikan harus mampu memfasilitasi (memungkinkan) anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi secara penuh dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya yang ada di Sarana dan

prasarana di sekolah harus dapat mengakomodir kebutuhan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus (Henny Nurwanto, Erma Hayati Ramadhan, dkk, 2018).

Sarana dan Prasarana pendidikan harus dapat diakses atau digunakan oleh anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya dengan mudah. Sarana dan Prasarana harus mampu memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Lingkungan fisik, Sarana dan Prasarana yang ada harus dapat diakses oleh anak berkebutuhan khusus secara aman. Artinya Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh sekolah aman digunakan oleh semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus, Lingkungan fisik Sarana dan Prasarana yang ada harus dapat diakses dan dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus secara nyaman. Setiap jenis hambatan (disabilitas) yang dialami oleh anak, membutuhkan jenis sarana dan sarana yang khusus (berbeda). Oleh karena itu, mungkin harus menyediakan Sarana dan Prasarana yang beragam untuk mengakomodir beragam jenis hambatan (Henny Nurwanto, Erma Hayati Ramadhan, dkk, 2018).

Penyelenggaran sekolah inklusi memang membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak, karena sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus anak tuna daksa, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, buku braile untuk anak tuna netra, dan sebagainya (Yusraini, 2013). Keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan kebutuhan khusus. Media adaptif bagi anak berkebutuhan khusus beraneka ragam sesuai dengan karakteristiknya. Media pembelajaran bagi siswa lamban belajar disamakan dengan anak tunagrahita. Media yang biasanya digunakan misalnya gradasi kubus, gradasi balok, menara gelang, puzzle, papan geometri, bak pasir, dan sebagainya. Contoh-contoh media pembelajaran bagi siswa lamban belajar, dapat diketahui bahwa media tersebut jika digunakan siswa lamban belajar dapat menstimulus siswa karena belajar sambil bermain sehingga anak lamban belajar merasa senang. Perlu adanya media pembelajaran sehingga dapat disimpulkan anak berkebutuhan khusus memerlukan media adaptif.

Permasalahan yang juga sering muncul di sekolah inklusi adalah permasalahan yang terkait manajemen sekolah yang termasuk belum siapnya dengan program sekolah inklusi baik dari segi kelengkapan administrasi dan sarana yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Misalnya pelatihan dan work shop, seminar, lokakarya, yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Permasalahan anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda dan memerlukan penanganan yang berbeda-beda serta jumlah anak berkebutuhan khusus yang melebihi kuota dalam tiap kelasnya mengharuskan sekolah untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang bisa diakses oleh semua anak berkebutuhan khusus.

Problem Tenaga Pendidik

Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa difabel dalam program yang sama. Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak penuh berpartisipasi dalam kegiatan kelas reguler tanpa mempertimbangkan kecacatan atau karakteristik lainnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi ditujukan memenuhi target pendidikan untuk semua warga negara dan

pendidikan dasar sembilan tahun. Keuntungan penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah selain untuk memenuhi hak-hak asasi manusia, hak-hak anak, namun juga dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hal tersebut karena pendidikan inklusi dimulai dengan merealisasikan perubahan keyakinan masyarakat tentang anak difabel yang akan menjadi bagian dari keseluruhan warga negara, tanpa ada diskriminasi (Tyas Martika Anggriana Rischa Pramudia Trisnani, 2016).

Ward (1987) berpendapat bahwa penolakan dari guru dan lemahnya dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang anak dengan kebutuhan khusus. Latar belakang pendidikan yang tidak memberikan bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus menjadi penyebab guru di sekolah regular menolak adanya kebijakan sekolah inklusi. Guru menganggap diri mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengajar siswa dengan berbagai kebutuhan khusus, namun kebijakan telah menuntut mereka untuk menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan guru dan perlakuan guru (Pavri & Luftig; Cook, 2000, dalam Pujaningsih, 2011). Sikap yang ditunjukkan guru tersebut akan mempengaruhi penerimaan anak berkebutuhan khusus oleh teman-temannya (Paris, 2000). Dengan demikian komitmen guru di sekolah inklusi menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam keberhasilan atau kegagalan program inklusif (Jamilah Candra Pratiwi, 2015).

Kompetensi Pribadi Kompetensi pribadi merujuk pada kualitas pribadi konselor yang berkenaan dengan kemampuan untuk membangun hubungan baik secara sehat, etos kerja, komitmen profesional, landasan etik dan moral dalam berperilaku, dorongan dan semangat untuk mengembangkan diri, serta kemampuan untuk melakukan problem solving. Kompetensi Inti Kompetensi inti merupakan kemampuan langsung untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan bimbingan mulai dengan menyelenggarakan pelayanan bimbingan mulai dengan penguasaan landasan konsep dan teori bimbingan dan konseling, menyelenggarakan berbagai macam layanan bimbingan dalam berbagai setting dan kemampuan manajerial. Kompetensi Pendukung Kompetensi pendukung merupakan kemampuan tambahan yang diharapkan dapat memperkuat atau memperkokoh daya adaptasi konselor (Tyas Martika Anggriana Rischa Pramudia Trisnani, 2016).

Berdasarkan pada uraian tiga kompetensi tersebut, maka dapat dikembangkan aspek kinerja guru kelas pendamping siswa ABK, sebagai berikut (1) Mampu menunjukkan hubungan antar pribadi yang sehat, (2) Memiliki etos kerja dan komitmen profesional dalam memberikan bantuan kepada siswa ABK, (3) Melaksanakan etika dan moral dalam berperilaku, (4) Memiliki dorongan dan upaya untuk mengembangkan diri, (5) Memiliki kemampuan memecahkan masalah dan penyesuaian diri. Hal ini artinya bahwa seorang guru harus bertanggung jawab untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak. Dalam mendampingi siswa ABK, guru kelas di sekolah dasar diharapkan memiliki beberapa kompetensi yaitu: 1. Kompetensi melaksanakan penerimaan siswa baru yang mengakomodasi semua anak, 2. Kompetensi melaksanakan kurikulum yang fleksibel dan akomodatif, 3. Kompetensi merancang bahan ajar, KBM dan menata kelas yang ramah anak, 4. Kompetensi pengadaan pemanfaatan media adaptif, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusi (Tyas Martika Anggriana Rischa Pramudia Trisnani, 2016).

Selain itu permasalahan yang dihadapi kurangnya guru pendamping kelas, kurangnya kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, guru kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar, kurangnya pemahaman guru tentang anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi, latar belakang guru yang tidak sesuai, beban administrasi yang semakin berat, kurangnya kesabaran guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus dan guru mengalami kesulitan dengan orangtua (Nissa Tarnoto, 2016).

Problem Kerjasama

Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat diperlukan peran serta sekolah dan pejabat daerah terkait. Misalnya sekolah berkerjasama dengan tim penggerak PKK kelurahan untuk mensosialisasikan keberadaan anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi. Kerjasama ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat hingga lapisan terbawah. Selain itu dibutuhkan usaha dari pemerintah pusat untuk mempromosikan keberadaan sekolah inklusi dan dampak positif yang akan diperoleh. Selama 10 tahun penyelenggaraan pendidikan inklusi, pemerintah baru terlihat memberikan bantuan dibidang keuangan, namun belum mempromosikannya, seperti pada saat Sekolah Kejuruan (Jamilah Candra Pratiwi).

Adapun kerjasama lainnya yaitu adanya kunjungan kerumah anak didik, rapat, surat menyurat antara sekolah, dan raport. Seperti yang dinyatakan Hasbullah menyatakan bahwa, Pada dasarnya banyak cara yang ditempuh untuk menjalin kerjasama antara guru selaku pihak sekolah dan orang tua selaku keluarga dari anak, diantaranya yaitu, 1) Adanya kunjungan ke rumah anak didik, 2) Diundangnya orang tua ke sekolah, 3) *Case conference* (rapat), 4) Badan pembantu sekolah, 5) Mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga. Faktor yang menjadi pendukung kerjasama guru dan orang tua adalah terutama adalah kepercayaan dan komunikasi, sehingga orang tua bersedia membantu secara materi, serta lokasi. Adapun hambatan berasal dari kurang anggaran untuk melaksanakan kegiatan, kurangnya kejujuran orang tua bahwa anak memiliki kebutuhan khusus, kurangnya kehadiran orang tua dalam kegiatan untuk mendampingi anak. Semua hambatan menjadi pertimbangan guru dalam evaluasi untuk melaksanakan program kerjasama selanjutnya agar semua hambatan tersebut dapat teratasi (Fransiska Yesi, Muhammad Syukri, Desni Yuniarni).

Bentuk-bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat antara lain:

1. Mengikutsertakan guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat partisipasi warga sekolah, termasuk guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional, atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Selain itu keikutsertaan guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat bisa ditunjukkan dengan program bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu atau yang terkena musibah atau bencana, atau kegiatan bazar sekolah dengan memamerkan hasil karya siswa termasuk pementasan karya tulis, karya seni dan karya keterampilan pada saat HUT RI, kunjungan guru kerumah tokoh masyarakat. Hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat.
2. Menyediakan fasilitas sekolah untuk masyarakat, sekolah dapat menyediakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat sekitar sepanjang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Misalnya lapangan olahraga anggota masyarakat di luar jam pelajaran sekolah, halaman

sekolah untuk shalat idul fitri atau idul adha untuk agama Islam, LCD sekolah untuk acara perayaan HUT RI.

3. Mengikutsertakan pemuka atau tenaga ahli di masyarakat ke dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Dalam menjalankan kegiatan yang direncanakan, sekolah tidak lepas dari dukungan masyarakat, masyarakat sangat berperan aktif dan mempengaruhi sekolah yang ada di dalamnya, misalnya dalam kegiatan-kegiatan tersebut: ekstrakurikuler dibidang tarik suara, pada saat perayaan hari besar pihak sekolah mendatangkan tokoh agama dalam masyarakat, pada saat acara perpisahan mendatangkan masyarakat yang berpotensi dibidang seni dan memberikan sambutan, sekolah mengundang organisasi atau perseorangan yang bersimpati terhadap pendidikan untuk untuk mengadakan rapat bersama guna membahas pendidikan lingkungan dan masalah kenakalan.
4. Menggunakan sarana yang tersedia di masyarakat untuk keperluan sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan memandang masyarakat sebagai laboratorium untuk belajar sehingga penting bagi guru-guru untuk mengetahui fasilitas apa yang tersedia di dalam masyarakat yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya sumber-sumber alam lingkungan sekitar, keadaan flora dan fauna, lapangan, jalan desa, transportasi lalu lintas. Semua sarana tersebut dapat dimanfaatkan sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
5. Mendayagunakan potensi masyarakat penanggung jawab pendidikan. Berdirinya suatu lembaga pendidikan tidak lepas dari peran masyarakat. Potensi di dalam masyarakat sangat mendukung perkembangan sekolah yang ada dilingkungannya. Misalnya mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam keanggotaan komite sekolah, mengikutsertakan masyarakat dan komite sekolah dalam rapat sekolah, menampung aspirasi dari masyarakat yang memiliki potensi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah tersebut.
6. Mendayagunakan potensi orangtua siswa. Hubungan antara sekolah dengan orangtua siswa diperlukan secara terus menerus selama orangtua masih mempunyai anak yang bersekolah di sekolah tersebut. Diperlukan kerjasama antara sekolah dan orangtua demi kepentingan siswa. Contohnya mendidik mental anak disini orangtua mempunyai kemampuan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada anak melalui teladan berkata maupun berperilaku. Selain itu pengembangan bakat anak, setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus mempunyai bakat-bakat tertentu baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Bakat anak tersebut perlu diketahui orangtua agar dapat dikembangkan dan difasilitasi orangtua sehingga bakat anak dapat berkembang dengan optimal.
7. Membantu anak dalam bidang pengajaran, hal ini dapat dilakukan orangtua dengan membantu dan mendampingi anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas.

Mengikutsertakan dunia usaha untuk kepentingan sekolah, sekolah dapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang usaha tertentu dan dunia usaha dapat pula dijadikan penyandang dana dalam acara-acara khusus sekolah (Fransiska Yesi, Muhammad Syukri, Desni Yuniarni). Hal ini sangat dibutuhkan oleh sekolah inklusi agar pembelajaran berjalan secara optimal demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus, sehingga siswa berkebutuhan khusus bisa diterima di dunia kerja untuk kehidupan yang mandiri dan berkualitas.

KESIMPULAN

Masalah yang timbul diantara satu dengan lainnya apabila dikaji mendalam bisa saling berhubungan, seperti masalah siswa, guru, sekolah, pemerintah, ataupun masyarakat. Berkenaan pada masalah guru, guru memiliki keluhan dimana kurangnya kompetensi terkait penanganan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dimana penyebabnya yakni pemahaman guru yang kurang terkait sekolah inklusi serta ABK yang selanjutnya berimbas pada masalah kesulitannya aktivitas pembelajaran oleh guru. Kondisi tersebut pun didukung oleh realita dimana terdapat sejumlah guru yang latar pendidikannya tidak tepat serta Guru Pendamping Kelas yang kurang dimana mampu memperberat beban kerjanya guru sendiri. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh Guru Pendidik Khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Masalah yang timbul diantara satu dengan lainnya apabila dikaji mendalam bisa saling berhubungan, seperti masalah siswa, guru, sekolah, pemerintah, ataupun masyarakat. Berkenaan pada masalah guru, guru memiliki keluhan dimana kurangnya kompetensi terkait penanganan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dimana penyebabnya yakni pemahaman guru yang kurang terkait sekolah inklusi serta ABK yang selanjutnya berimbas pada masalah kesulitannya. Problem di sekolah inklusi tersebut anatara lain: problem pembelajaran di kelas, problem sarana dan prasarana, problem tenaga pendidik, problem kerjasama baik orangtua, masyarakat dan dunia usaha. Perlu pengelolaan yang optimal dari semua elemen yang memegang proses suksesnya sekolah inklusi khususnya di perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan. (2017). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Studia Insanica*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1358>
- UU No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Permendikbud, Nomor. 24 Tahun 2016, Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang SMP/MTs.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 1991. Tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Agung Tri Wibowo¹ Nur Laila Anisa, Problematika Pendidikan Inklusi Di Indonesia, Magister Pendidikan Dasar UMS, Surakarta agungfx182@yahoo.com.
- Jane M. Keothermen, "Teacher Attitudes Toward Inclusion," *Journal of early childhood teacher Education*, Vol. 2. Edisi. 1, 2007.
- Jamilah Candra Pratiwi. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan "Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi" Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah Surakarta, 21 November 2015 ISBN: 978-979-3456-52-2 .
- Narullyta Puspita Dewi. *Problematika Pembelajaran Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Inklusi Dan Strategi Menanganinya* Jurnal Pendidikan Inklusi Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020.
- Tyas Martika Anggriana. KOMPETENSI GURU PENDAMPING SISWA ABK DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Konseling GUSJIGANG* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2016) Print ISSN 2460-1187, Online ISSN 2503-281X.

- Henny Nurwanto, Erma Hayati Ramadhan, dkk, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Sarana dan Prasarana. Jakarta: 2018.
- Jamilah Candra Pratiwi. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN “Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi” Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah Surakarta, 21 November 2015 ISBN: 978-979-3456-52-2 .
- Nissa Tarnoto. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. Jurnal Humanitas Vol.13 No. 1. 2016.
- Jamilah Candra Pratiwi. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN. hlm. 241.
- Fransiska Yesi, Muhammad Syukri, Desni Yuniarni. Kerjasama Antara Guru Dan Orang Tua Dalam Pelayanan Pada Abk Di Tk Inklusi Tunas Kasih. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Untan Pontianak.